



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN HARAU  
TAHUN 2022**

**Sarilamak,   Maret 2021**

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga RENJA (Rencana Kerja) Kecamatan Harau ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua .

Tanjung Pati, Maret 2021

**CAMAT HARAU**

**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
NIP. 19720920 199202 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b>	<b>: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN HARAU TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Harau.....	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Harau.....	18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Harau.....	21
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	34
<b>BAB III</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN HARAU .....</b>	<b>35</b>
	3.1 Formula Indikator Kinerja Utama Kec Harau.....	35
	3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
	3.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	39
	3.4 Program dan Kegiatan	
<b>BAB IV</b>	<b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>46</b>
	4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 (Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019) .....	49
<b>BAB V</b>	<b>: Penutup.....</b>	<b>62</b>

## Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Harau Tahun dan Pencapaian Renstra Kec. Harau s/d Tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Harau	19
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota	26
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota	35
Tabel 3.1	Formula Indikator Kinerja Utama Kecamatan Harau	38
Tabel 3.2	Program dan kegiatan Kecamatan Harau (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	39
Tabel 3.3	Program dan kegiatan Kecamatan Harau (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	42
Tabel 4.1	Rumusan pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Dan perkiraan maju 2023 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Harau juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Kecamatan Harau (Renja Kecamatan Harau). Renja Kecamatan Harau ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Harau. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Kecamatan Harau harus segera menyusun dan menetapkan Renja Kecamatan Harau Tahun 2021.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Tujuannya untuk menjamin kesesuaian antara program,

kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANG kabupaten Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Dalam hal hasil verifikasi apabila ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Bappelitbang menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, masing-masing OPD menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala Bappelitbang. Renja sebagai bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan renja yang telah diverifikasi oleh bappelitbang sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Harau Tahun 2021 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima

- Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
  23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
  25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Dengan telah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan tidak lagi sebagai wilayah administrasi sebagaimana kita kenal selama ini,

akan tetapi kecamatan mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah.

### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Kecamatan Harau 2021 disusun dengan maksud sebagai :

- 1) Pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Harau Tahun 2021.
- 2) Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Kecamatan;
- 3) Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Harau guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Harau 2021 adalah:

- 1) untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD)
- 2) Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Harau, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku

dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

- 3) Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.
- 4) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- 5) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Kecamatan Harau;
- 6) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
- 7) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Harau Tahun 2021 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Harau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan harau
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Harau
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Harau
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

##### **BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN HARAU TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Harau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Harau**

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Harau tahun 2020 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2020 yang sudah disahkan. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Harau Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Harau tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Harau tahun 2020 dan realisasi Renstra Kecamatan Harau mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Harau dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Harau Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kec. Harau s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019  (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2021/(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja OPD Tahun 2020/(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-2)	Tingkat Realisasi (%) tahun 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Usuran Pemerintahan Umum												
5	XX	Kewilayahan											
1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	75	NA	75	NA	NA	75	75		
1	11	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

1	11	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	48 unit	8 unit	10 unit	8 unit	80%	10 unit	25 unit	52,1%
1	11	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan komputer, laptop, printer dan peralatan kantor lainnya	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

1	11	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan atau majalah dan Peraturan Perundang-undangan serta dokumen perencanaan	12 bulan	36 bulan	-	-	-	-	-	-
1	11	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>NA</b>	<b>79</b>	<b>88,47</b>	<b>111,9</b>	<b>79</b>	<b>167,47</b>	<b>98,75</b>
1	11	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Penambahan Ruang Kantor	60%	-	-	-	-	-	-	-
1	11	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas roda 2	4 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	2 unit	50%
1	11	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%
1	11	2	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60%

1	11	2	2 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	100%
1	11	2	2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	2	2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
1	11	2	4 2	Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab gedung kantor	4 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	2 paket	50%
1	11	3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>NA</b>	<b>79</b>	<b>88,47</b>	<b>111,9%</b>	<b>80%</b>		<b>-</b>
1	11	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	1 paket	-	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	100%
1	11	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khas daerah	1 paket	-	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	-
1	11	5		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>NA</b>	<b>79</b>	<b>88,47</b>	<b>111,9%</b>	<b>80%</b>	<b>167,47</b>	<b>98,75</b>

1	11	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kecamatan	1 paket	-	-	-	-	-	-	-
1	11	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek peraturan perundang-undangan bagi aparatur Nagari dan Kecamatan	1 paket	12 paket	-	-	-	-	12 paket	100 %
1	11	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau</b>	<b>75</b>	<b>NA</b>	<b>75</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>
1	11	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	125 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100%	25 dokumen	75 dokumen	58,4%
1	11	15		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif</b>	<b>92%</b>	<b>NA</b>	<b>75%</b>	<b>50 %</b>	<b>66,7%</b>	<b>92%</b>	<b>142%</b>	<b>154,34%</b>
1	11	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Pilwanag dan Keikutsertaan pada MTQ Tk. Kabupaten serta kegiatan kemasyarakatan lainnya	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 dokumen	80%

1	11	17		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Meningkatnya Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau</b>	<b>10 Nagari</b>	<b>NA</b>	<b>9 Nagari</b>	<b>9 Nagari</b>	<b>100%</b>	<b>10 Nagari</b>	<b>18 Nagari</b>	<b>90%</b>
1	11	17	2	Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan	60 nagari	11 nagari	12 nagari	12 nagari	100%	12 nagari	35 nagari	58,3%
4	XX	1		<b>Sekretariat</b>									
1	11	23		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>NA</b>	<b>79</b>	<b>88,47</b>	<b>111,9</b>	<b>79</b>	<b>167,47</b>	<b>98,75</b>
1	11	23	6	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	80%
1	11	24		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau</b>	<b>80</b>	<b>NA</b>	<b>79</b>	<b>88,47</b>	<b>111,9</b>	<b>79</b>	<b>167,47</b>	<b>98,75</b>
1	11	24	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya lomba nagari	60 nagari	11 nagari	12 nagari	12 nagari	100%	12 nagari	35 nagari	60%
5	XX	1		<b>Kecamatan</b>									
1	11	xx		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>75%%</b>	<b>NA</b>	<b>75%</b>	<b>54,54%</b>	<b>72,72%</b>	<b>75%</b>	<b>129,4%</b>	<b>172,72%</b>

1	11	xx	x x	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Ditetapkannya APB Nagari tepat waktu	60 nagari	-	12 nagari	12 nagari	100%	12 nagari	24 nagari	40%
1	11	8	1 9	Bimbingan, Supervisi, & Pengawasan dana nagari	Terlaksananya penyaluran dana Nagari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	60 nagari	11 nagari	12 nagari	12 nagari	100%	12 nagari	35 nagari	58,3%
1	11	24	4	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terciptanya keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60 nagari	11 nagari	12 nagari	12 nagari	100%	12 nagari	35 nagari	58,3%
1	11	xx	x x	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Terpantaunya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Baik	60 nagari	11 nagari	12 nagari	12 nagari	100%	12 nagari	35 nagari	100%

Tanjung Pati, Juli 2020



Berdasarkan tabel diatas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
  - a. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target awal pada renstra yaitu nol maka realisasi kegiatan tersebut juga nol.
  - b. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan target awal pada renstra yaitu nol maka realisasi kegiatan tersebut juga nol.
  - c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tidak dianggarkan pada tahun 2020,
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas memiliki capaian realisasi nol dikarenakan target awal pada renstranya nol.
  - e. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan capaian realisasi nol dikarenakan tidak dianggarkan untuk tahun 2020.
  - f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target awal pada renstra yaitu nol maka realisasi kegiatan tersebut juga nol.
  - g. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target awal pada renstra yaitu nol maka realisasi kegiatan tersebut juga nol.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Harau**

Capaian kinerja Kecamatan Harau mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja yang diinginkan, target dan realisasi capaian kinerja Kecamatan Harau.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Harau**

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis	
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	55	60	65	71	73	75	-	-	54,38	61,58	-		
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73	75	75	78	79	80	-	-	NA	88,69	88,47		
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	NA	NA	10 nagari	8 nagari	9 nagari	10 nagari	-	-	10 Nagari	9 nagari	9 nagari		
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	NA	NA	30%	33%	50%	75%	-	-	36,36%	36,36%	36,36%		
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	NA	NA	80%	50%	75%	92%	-	-	85,7%	54,54%	54,54%		

Penjelasan :

- a) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Harau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2018 Nilai AKIB Kecamatan Harau masih predikat CC dengan nilai sebesar 54,38, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan dengan memperoleh predikat B dengan nilai sebesar 61,58. Untuk tahun 2020 masih dalam proses.
- b) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat baru mulai berjalan di tahun 2019 dengan memperoleh indeks sebesar 88,69% dari survey masyarakat terhadap pelayanan di kantor camat. Untuk tahun 2020 survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kantor camat senilai 88,47%.
- c) Indikator Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau adalah 9 nagari dari 11 nagari dengan capaian realisasi tahun 2019 sebesar 100% karena target pada renstra hanya 8 nagari sedangkan terealisasi sebanyak 9 nagari. Di tahun 2020 realisasi indikator jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan harau sebesar sama dengan tahun sebelumnya.
- d) Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu dengan capaian realisasi untuk tahun 2019 sebesar 100% dengan target awal tahun 2019 sebesar 33% terealisasi sebesar 36,36% yaitu sebanyak 4 nagari. Untuk tahun 2018 jumlah nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu juga sama yaitu 4 nagari, sama halnya dengan Tahun 2020 ada 4 nagari yang menetapkan APN-Nagari tepat waktu sehingga realisasinya senilai 36,36% dan belum mencapai target.
- e) Indikator Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif realisasi indikator kinerjanya adalah 54,54% yaitu ada 6 (enam) nagari yang bumagnya aktif sama dengan kondisi di Tahun 2018, sama halnya dengan tahun 2020 dengan capaian realisasi sebesar 54,54%.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Harau**

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Harau. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Kecamatan Harau sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Harau, ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Publik Masih belum maksimal
- 2) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga masyarakat (partisipasi publik) dalam pembangunan
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas pelayanan
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

Permasalahan yang ada di kecamatan Harau yaitu:

- a) Dana Desa/Nagari yang telah mulai dikucurkan pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu berdampak semakin tingginya beban kerja Wali Nagari bersama dengan aparatur yang ada di nagari. Minimnya SDM dan kurangnya pemahaman aparatur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini terutama dalam penatausahaan keuangan, mewajibkan pemerintah yang lebih atas/OPD terkait dapat

hendaknya mengadakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Wali Nagari dan aparaturnya.

- b) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan
- c) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- e) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- f) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis S.W.O.T dengan proses sebagai berikut;

a. Lingkungan Internal

**Kekuatan :**

- Visi dan misi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan (Anggaran rutin) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

**Kelemahan**

- Jumlah dan kualitas SDM yang masih kurang
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

- Tidak adanya anggaran selain untuk kegiatan rutin di Kecamatan Harau.

#### b. Lingkungan Eksternal

##### **Peluang**

- RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
- Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

##### **Ancaman :**

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan belum memadai yang masih perlu pembenahan
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Harau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian

inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Harau

- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
3. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
    - a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS (Geografis Information System), yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
    - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Bapelitbang terlihat bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

OPD : KECAMATAN HARAU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Kelengkapannya	12 Bulan	2,800,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Kelengkapannya	12 Bulan	2,800,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	26,800,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	26,800,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15,900,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15,900,000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Camat Harau	Tersedianya Biaya Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit	3,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Camat Harau	Tersedianya Biaya Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit	3,600,000	

5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Harau	Tersedianya Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara Penjaga Kantor	12 Bulan	126,700,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Harau	Tersedianya Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara Penjaga Kantor	12 Bulan	126,700,000	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan	23,050,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan	23,050,000	
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer, Laptop, Printer dan Peralatan Kantor Lainnya	12 Bulan	6,655,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Harau	Tersedianya Jasa Perbaikan Komputer, Laptop, Printer dan Peralatan Kantor Lainnya	12 Bulan	6,655,000	
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya ATK	12 Bulan	21,300,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya ATK	12 Bulan	21,300,000	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Harau	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13,100,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Harau	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	13,100,000	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	4,675,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	4,675,000	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Harau	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	16,335,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat Harau	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	16,335,000	

12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Harau	Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan atau majalah dan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan	12 Bulan	2,300,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Harau	Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan atau majalah dan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan	12 Bulan	2,300,000	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat Harau	Terlaksananya pelayanan kebutuhan makan dan minum rapat	12 bulan	41,896,000	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat Harau	Terlaksananya pelayanan kebutuhan makan dan minum rapat	12 bulan	41,896,000	
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kantor Camat Harau	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor camat	12 bulan	70,579,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kantor Camat Harau	Meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor camat	12 bulan	70,579,000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kantor Camat Harau	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kantor Camat Harau	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
1	Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Penambahan Ruang Kantor	1 Paket	575,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Penambahan Ruang Kantor	1 Paket	575,000,000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Harau	Tersedianya 2 bh Kendaraan Roda 2	1 Paket	26,979,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Harau	Tersedianya 2 bh Kendaraan Roda 2	1 Paket	26,979,000	

4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	4,250,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Harau	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	4,250,000	
5	Pengadaan Mebeleur	Kantor Camat Harau	Tersedianya Mebeleur Kantor	1 Paket	11,900,000	Pengadaan Mebeleur	Kantor Camat Harau	Tersedianya Mebeleur Kantor	1 Paket	11,900,000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	12 Bulan	57,500,000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	12 Bulan	57,500,000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Camat Harau	Terlaksana Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	24,150,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Camat Harau	Terlaksana Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	24,150,000	
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas (Kend. Roda 4 & roda 2)	9 unit	108,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas (Kend. Roda 4 & roda 2)	9 Unit	108,000,000	
10	Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	1 Paket	245,600,000	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	1 Paket	245,600,000	

	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21 Stel	13,800,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	21 Stel	13,800,000	
2	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus	21 Stel	13,800,000	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus	21 Stel	13,800,000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Camat Harau	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kecamatan	10 OK	14,375,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Camat Harau	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kecamatan	10 OK	14,375,000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan dan Nagari	5 Kegiatan	57,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan dan Nagari	5 Kegiatan	57,500,000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja &amp; keuangan</b>					<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja &amp; keuangan</b>					

1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Harau	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Akhir Tahun	23 Dokumen	20,300,000	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Camat Harau	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Akhir Tahun	23 Dokumen	20,300,000	
	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>										
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat Harau	Tersedianya Sistem Informasi Pendukung Pelaksanaan PATEN	11 Nagari	43,500,000	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Kantor Camat Harau	Tersedianya Sistem Informasi Pendukung Pelaksanaan PATEN	11 Nagari	43,500,000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik</b>					<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik</b>					
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Kantor Camat Harau	Tersusunnya APB-Nagari, Laporan LKPJ dan Produk Hukum Nagari sesuai dengan Kaidah Peraturan Perundang-undangan	11 Nagari	31,800,000	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Kantor Camat Harau	Tersusunnya APB-Nagari, Laporan LKPJ dan Produk Hukum Nagari sesuai dengan Kaidah Peraturan Perundang-undangan	11 Nagari	31,800,000	
2	Bimbingan Supervisi, Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Penyaluran Nagari Sesuai Peraturan PerUU-an yang Berlaku	11 Nagari	59,000,000	Bimbingan Supervisi, Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Penyaluran Nagari Sesuai Peraturan PerUU-an yang Berlaku	11 Nagari	59,000,000	

3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kantor Camat Harau	Terciptanya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11 Nagari	80,850,000	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kantor Camat Harau	Terciptanya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11 Nagari	80,850,000	
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Kantor Camat Harau	Terpantaunya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Baik	11 Nagari	46,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Kantor Camat Harau	Terpantaunya Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Baik	11 Nagari	46,000,000	
	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>					<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>					
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Monev dan Koordinasi di tk. Kecamatan	11 nagari	69,000,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kantor Camat Harau	Terlaksananya Monev dan Koordinasi di tk. Kecamatan	11 nagari	69,000,000	
	<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>					<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>					
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan	Kantor Camat Harau	Terfasilitasnya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di kecamatan	6 Organisasi	42,300,000	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan	Kantor Camat Harau	Terfasilitasnya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di kecamatan	6 Organisasi	42,300,000	

	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>					<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>					
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kantor Camat Harau	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	11 nagari	56,900,000	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kantor Camat Harau	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	11 nagari	56,900,000	
					<b>1.978.194.000</b>						<b>1.978.194.000</b>

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Kecamatan Harau tahun 2021 sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang pada renja Kecamatan harau adalah 10 program,
2. Jumlah kegiatan yang tertuang pada rancangan awal RKPD adalah 35 Kegiatan.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Harau pada Tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari;
- 3) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Harau maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Kecamatan Harau di Tahun 2020 tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari pemangku Kepentingan.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2022**

**OPD : Kecamatan Harau**

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN HARAU

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Harau dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Nagari; Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

**Visi** dari Kecamatan Harau adalah sama dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah”**.

**Misi** adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program –

program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun Misi Kecamatan Harau adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis Jorong.

Pemahaman terhadap misi-misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan tata pemerintahan ditingkat kecamatan yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat dan aparatur.
2. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi didukung sistim informasi handal, sehingga dapat lebih menjamin kinerja pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparan dan akuntabel.
3. Mampu melakukan koordinasi dalam rangka memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor baik pusat, provinsi maupun kegiatan OPD bahkan kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat untuk mendapatkan manfaat program dan kegiatan secara efektif dan efisien.
4. Mengoptimalkan koordinasi penegakan supremasi hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban sebagai bagiani kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktifitas masyarakat yang lebih efisien dan produktif. Kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan kerukunan warga masyarakat menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktifitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis.
5. Untuk mampu berfungsi sebagai Kecamatan yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan secara produktif.
6. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memperhatikan Kecamatan Harau sebagai kawasan IKK sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2002.

**Tujuan** adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu atau hasil yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) Tahun.

**Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah.

Kecamatan Harau menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

Tujuan :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

Indikator Tujuan :

- Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Harau.
- Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kinerja kinerja pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Reformasi Birokrasi.

Indikator Sasaran :

- Nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Harau.
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.1 Formula Indikator Kinerja Utama Kecamatan Harau

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM
1	Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak Sarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi (misi 4)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	65	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan oleh Inspektorat n-1	Meningkatkan Kualitas dokumen AKIP Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.190.772.167
				Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	Sesuai dasar Permenpan RB No 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004	Meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat akan Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 39.759.300
										Melakukan analisis terhadap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 51.567.000
										Optimalisasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan nagari	3. Program Ketentraman dan Ketertiban	Rp 31.588.600
											4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 39.083.000
Menyusun Rencana Kerja Pengawasan nagari	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 100.653.300										

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Harau untuk Rencana Kerja tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala daerah terutama visi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Harau tahun 2021 dapat dikelompokkan ke dalam 10 program dengan 35 Kegiatan bersifat rutin dan terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Harau pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Program dan kegiatan Kecamatan Harau**  
**(Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li><li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li><li>3. Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor</li><li>4. Penyedia jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li><li>5. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan</li><li>6. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li><li>7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</li><li>8. Penyediaan alat tulis kantor</li><li>9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li><li>10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li><li>11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li><li>12. Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li><li>13. Penyediaan Makan dan Minum</li></ol>

		14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>3. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>4. Pengadaan mebeleur</li> <li>5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</li> <li>6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>8. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor</li> </ol>
3	Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya</li> <li>2. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu</li> </ol>
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> </ol>
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN</li> </ol>
6.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol>
7.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Produk Hukum Nagari</li> <li>2. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya.</li> <li>4. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> </ol>

8.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
10.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Harau dikelompokkan ke dalam 10 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Rumusan Program dan Kegiatan Kec. Harau pada tahun 2021 serta Perkiraan Maju tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

### 3.3.2 Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Nomenklatur Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Harau tahun 2022 dapat dikelompokkan ke dalam 6 program dengan 14 Kegiatan bersifat rutin dan terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Harau pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Program dan kegiatan Kecamatan Harau**  
**(Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>➤ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</li> </ul>

- Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel

		<p>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>➤ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air</li> <li>➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
		<p>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>sub kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>➤ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>➤ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>➤ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>➤ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	<p>9. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</li> </ul> <p>10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub kegiatan: Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan</p>

3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<p>11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>➤ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> </ul>
4.	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	<p>11. Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</li> </ul> <p>12. Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkara</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi/Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian republik Indonesia</li> </ul>
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<p>13. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</li> <li>➤ Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</li> </ul>
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<p>14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa</li> <li>➤ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li> <li>➤ Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset</li> <li>➤ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</li> <li>➤ Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif</li> <li>➤ Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</li> <li>➤ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan</li> </ul>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021

#### 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 ( Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019)

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Memiliki Indikator Program yaitu nilai akuntabilitas kinerja kecamatan harau dengan Pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 9.368.409.415,00  
dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2023 sebesar Rp 2.863.542.857,25

Kegiatannya adalah:

- Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Nilai indeks kepuasan masyarakat dengan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar Rp **39.759.300**

dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2023 sebesar Rp **43.735.230.**

Kegiatannya adalah:

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar **Rp 51.567.000** dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2023 sebesar **Rp 56.723.700**

Kegiatannya adalah:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar **Rp 31.588.600** dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2023 sebesar **Rp 34.747.460**

Kegiatannya adalah:

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar **Rp 39.083.000**

dan Pagu Prakiraan Maju tahun 2023 sebesar **Rp 42.991.300**

Kegiatannya adalah:

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program pembinaan dan pengwasan pemerintahan desa.  
Memiliki indikator yaitu persentase nagari yang menetapkan APB-  
Nagari tepat waktu dengan pagu indikatif tahun 2022  
**Rp 100.653.300**  
dan pagu indikatif tahun 2023 **Rp 147.371.950**

Tabel 4.1

Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah  
Program dan kegiatan tahun 2022

No	Bidang Urusan	Tahun 2022		Tahun 2023	Tahun 2022		Tahun 2023	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	
1.	<b>Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.</b>							
1.1	Kecamatan	6	<b>9.631.060.615</b>	<b>3.189.112.497</b>	6	<b>9.631.060.615</b>	<b>3.189.112.497</b>	
	Total	6	<b>9.631.060.615</b>	<b>3.189.112.497</b>	6	<b>9.631.060.615</b>	<b>3.189.112.497</b>	

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Harau dikelompokkan ke dalam 6 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Rumusan Program dan Kegiatan Kec.

Rumusan pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Dan perkiraan maju 2023 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) dapat dilihat dari Tabel 4.2 sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) 2022	Prakiraan Maju (Rp.) 2023	Keterangan
				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>KECAMATAN</b>												
									<b>9.631.060.615</b>	<b>3.189.112.497</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									<b>9.368.409.415</b>	<b>2.613.026.936</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									<b>21.792.100</b>	<b>23.975.710</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Renstra dan Renja Kantor Camat Harau	2 Dokumen			1.444.100	1.588.510	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya RKA	1 Dokumen			1.440.100	1.588.510	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Perubahan RKA 1 Dokumen	1 Dokumen			1.549.100	1.704.010	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya DPA	1 Dokumen			1.533.100	1.686.410	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Perubahan DPA	1 Dokumen			1.601.400	1.761.540	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SAKIP, dan LAKIP	6 Dokumen			14.224.300	15.646.730	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>1.782.207.115</b>	<b>2.048.957.227,25</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi birokrasi Reformasi birokrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan			Tersedianya Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK. PPK	24 PNS			1.770.588.015	2.036.176.217,25	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
				Capaian		Keluaran		Ha				
				Program	Target	Sub Kegiatan	Target	sil Kegiatan	Target			
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen SPJ	12 Dokumen			6.235.700	6.859.270	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Laporan Keuangan	1 Dokumen			1.773.900	1.951.290	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)	24 Dokumen			1.604.400	1.764.840	

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedia nya Laporan Prognosis	1 Dokumen			2.005.100	2.205.610	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										<b>1.779.600</b>	<b>1.957.560</b>	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedia nya Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, RKPBM, Pemanfaatan Aset, Laporan BMD	12 bulan			1.779.600	1.957.560	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>15.437.100</b>	<b>16.930.810</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedia nya Pakaian Dinas dan Pakaian Hari	28 stel			12.500.000	13.700.000	

						Tertentu beserta kelengkapannya						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya DUK, Bezetting, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, SKP, Rekomendasi TPP, Naik Pangkat, Naik Gaji	24 Pegawai			2.937.100	3.230.810	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>175.106.500</b>	<b>192.617.150</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	19 meter 33 Buah			15.119.000	16.630.900	

						nya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Komputer, Laptop, Printer dan Gorden	86 unit			8.500.000	9.350.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			29.078.500	31.986.350	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			15.031.000	16.534.100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya tamu	12 bulan			13.750.000	15.125.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan			93.628.000	102.990.800	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>7.089.880.000</b>	<b>173.500.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya kendaraan dinas roda 2	1 unit			21.000.000	23.100.000	
Pengadaan Mebel			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Mebeler Kantor	3 unit			64.000.000	70.400.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 unit			7.004.880.000	80.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>143.228.000</b>	<b>157.550.800</b>	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedia nya Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-	550 buah		3.600.000	3.960.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pembayaran tagihan rekening telepon dan listrik	12 bulan		30.450.000	33.495.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedia nya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit		8.914.400	9.805.840	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan dan Peralatan Kebersihan	12 bulan		100.263.600	110.289.960	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>138.979.000</b>	<b>248.053.600,00</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	12 bulan		68.750.000	75.625.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			perbaikan Printer, Komputer dan Laptop	21 unit		1.533.000	16.863.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Parkir Kantor Camat	1 unit		68.696.000	75.565.600	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rehab kamar mandi (wc) dan ruang laktasi	1 paket		0	80.000.000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									<b>39.759.300</b>	<b>43.735.230</b>	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									<b>22.712.100</b>	<b>24.983.310</b>	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan lomba nagari	11 nagari		22.712.100	24.983.310	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>									<b>17.047.200</b>	<b>18.751.920</b>	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan PATEN	12 bulan		17.047.200	18.751.920	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									<b>51.567.000</b>	<b>56.723.700</b>	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									<b>51.567.000</b>	<b>56.723.700</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan		23.413.000	25.754.300	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari	3 kegiatan		28.154.000	30.969.400	

						Besar lainnya dan Monitori ng					
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									<b>31.588.600</b>	<b>34.747.460</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									<b>16.825.000</b>	<b>18.507.500</b>	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terfasilitasi kegiatan organisasi ,lembaga dan tokoh keagamaan	1 kegiatan		16.825.000	18.507.500	
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>									<b>14.763.600</b>	<b>16.239.960</b>	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terfasilitasi kegiatan organisasi ,lembaga dan tokoh keagamaan	1 kegiatan , 40 kali		14.763.600	16.239.960	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									<b>39.083.000</b>	<b>42.991.300</b>	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>									<b>39.083.000</b>	<b>42.991.300</b>	

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi	1 kegiatan, 40 kali		19.320.000	21.252.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	1 kegiatan, 10 kali		19.763.000	21.739.300	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>									<b>100.653.300</b>	<b>147.371.950</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									<b>100.653.300</b>	<b>147.371.950</b>	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	11 nagari		8.676.400	9.544.040	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat, Monitoring dan evaluasi	1 kegiatan, 40 kali		10.270.100	11.297.110	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Supervisi dan pengawasan dana desa	1 kegiatan		10.971.200	12.068.320	

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari	10 nagari		37.626.200	41.388.820	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	11 nagari		9.768.200	10.745.020	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat, Monitoring dan evaluasi	11 nagari		13.671.100	15.038.210	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	11 nagari		9.670.100	47.290.430	

## **BAB V P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Harau dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Harau. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Harau ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkoordinasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renja dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra kecamatan yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh masing-masing seksi dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Tanjung Pati, Januari 2021

**CAMAT HARAU**

**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
NIP. 19720920 199202 1 001